

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desentralisasi adalah proses pengalihan kekuasaan politik, fiskal (keuangan), dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Moisiu, 2013). Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola anggaran dan melaporkan keuangan mereka sendiri. Namun, keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sangat bergantung pada akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem desentralisasi fiskal mulai diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999. Kedua undang-undang ini kemudian diperbarui menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini menimbulkan berbagai masalah karena setiap daerah memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda dalam hal keuangan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Perbedaan kemampuan ini menyebabkan ada daerah yang mengalami kemajuan pesat, sementara ada juga yang mengalami kemunduran dan membutuhkan bantuan finansial dari pemerintah pusat (Mudhofar & Tahar, 2016).

Dalam era desentralisasi saat ini, akuntabilitas dalam kinerja dan pelaporan keuangan menjadi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan

daerah. Akuntabilitas keuangan daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada DPRD dan masyarakat.

Informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting dalam akuntabilitas laporan keuangan karena BPK, sebagai pihak independen, bertugas mengaudit laporan keuangan dan memastikan bahwa pemerintah daerah menerapkan akuntabilitas keuangan secara menyeluruh melalui penilaian kewajaran informasi. Oleh karena itu, BPK memberikan opini audit sebagai penilaian atas akuntabilitas laporan keuangan. Semakin baik opini pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat, melalui penyajian laporan keuangan (Suryanto, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa daerah dapat secara mandiri meningkatkan akuntabilitas mereka.

Penelitian oleh Fontanella & Rossieta (2014), Erryana & Setyawan (2016), serta Mudhofar & Tahar (2016) menunjukkan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin meningkat akuntabilitas pelaporan keuangan daerah tersebut. Namun, penelitian Dewi (2017) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Keberhasilan penerapan otonomi daerah didukung oleh kinerja pemerintah yang tertib dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Fontanella & Rossieta (2014) menemukan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang berarti bahwa kinerja pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun, penelitian oleh Purbasari & Bawono (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan realisasi anggaran yang telah ditargetkan sebagai indikator bahwa mereka mampu menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk pengelolaan aset yang baik dan benar. BPK menemukan beberapa kasus audit di mana pemerintah daerah belum dapat mengelola aset dengan jelas, yang berdampak pada pengakuan aset yang tidak sesuai. Hal ini memengaruhi opini audit dan menurunkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat tidak hanya berfokus pada pelaporan penggunaan dana publik kepada pihak eksternal, tetapi juga perlu diimbangi dengan pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan salah satu dimensi dalam akuntabilitas yang merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk secara tepat melaksanakan tugas utamanya.

Akuntabilitas dianggap mampu memperbaiki kondisi pemerintahan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi korupsi,

sehingga menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis (Erryana & Setyawan, 2016). Pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari masyarakat, karena akuntabilitas menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada warga. Dengan keseriusan dan komitmen ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik akan meningkat (Riharjo, Budi & Anggraini, 2017). Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An- Nisa (4) ayat 58, yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”*

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi penting karena melalui pelaporan keuangan yang transparan dan akurat, pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengawasi penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah juga membantu membangun

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya.

Namun, dalam prakteknya, masih terdapat tantangan dalam mencapai akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang optimal. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas tersebut adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup aspek efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Kinerja yang baik akan berdampak positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, sistem pengendalian internal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, pelaporan keuangan dapat dipercaya dan risiko penyalahgunaan sumber daya dapat diminimalisir.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mudhofar & Tahar (2016) yang menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dikombinasikan dengan dengan penambahan variabel sistem pengendalian internal dari penelitian Oktaviani & Sari (2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data dari pemerintah daerah yang terlibat dalam proses desentralisasi fiskal. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antara variabel desentralisasi fiskal, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan memahami pengaruh desentralisasi fiskal, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

- a. Apakah desentralisasi fiskal memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?

- b. Apakah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- c. Apakah sistem pengendalian internal memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan penelitian untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris:

1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat yang diharapkan pada penelitian yaitu secara teoritis dan praktik. Berikut uraian manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Kontribusi terhadap teori: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang akuntansi pemerintahan dan manajemen keuangan publik. Dengan mengidentifikasi pengaruh desentralisasi fiskal, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

pemerintah daerah, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam konteks pemerintah daerah.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan mereka. Dengan memahami pengaruh desentralisasi fiskal, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan mereka.

### **b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi**

Dapat dijadikan sebagai tambahan literatur terkhusus dalam bidang akuntansi sektor publik.

### **c. Manfaat bagi Peneliti**

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi peneliti masa depan yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang topik-topik terkait, baik dalam konteks Indonesia maupun negara-negara lain yang mengalami proses desentralisasi fiskal.

### **d. Manfaat bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan meningkatkan akuntabilitas pelaporan



keuangan, pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan transparan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat.